



# **RANCANGAN AWAL (RANWAL) RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUAI TAHUN 2024**

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
KECAMATAN JUAI TAHUN 2023

RANWAL RENJA KECAMATAN JUAI TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2024 dapat dibuat.

Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2024 dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Pembuatan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Juai Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan arah kepada segenap karyawan dan manajemen Kantor Kecamatan Juai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta bahan untuk laporan selanjutnya.

Juai,      Maret 2023

Camat Juai,



**NANANG EDWARD, S.Sos., MM**

**NIP. 19800127 200604 1 016**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	22
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	67
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	67
3.3 Program dan Kegiatan.....	68
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	73
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Juai.....	73
4.2. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi .....	83
BAB.V PENUTUP .....	84

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang**

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah. Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan .

Dalam penyusunannya dilakukan dalam dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

- a. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD
- b. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Renja SKPD tahun 2024 adalah Penjabaran dari Renstra SKPD tahun 2021-2026.

### **1.2.Landasan Hukum**

Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 2024 mengacu pada landasan hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 tahun 2010 tentang peraturan pelaksanaan PP No. Tahunn 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Perme Peraturan Menteri Dalam Negeri ndagri No. 18 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana kerja pembangunan daerah Tahun 2017
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubaha Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang klasifikasi,kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan



Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);

13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No.05 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25)

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 2024 dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi Kecamatan Juai dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan visi dan misi

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah untuk merumuskan rencana kerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Kecamatan Juai sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya.

#### **1.3.2 Tujuan**

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 20234 adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/ kegiatan selama 1 tahun.

3. Menjamin kesesuaian kegiatan kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan – kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah – langkah / kebijakan tugas – tugas sesuai dengan kewenangannya.
4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun – tahun yang akan datang.

#### **1.4.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan secara garis besar, sistematika isi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–SKPD) Kecamatan Juai Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2023 yang didasarkan pada Renstra Kecamatan Juai Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Juai; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Dalam rangka memenuhi target sasaran RPJMD arah kebijakan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas data dan informasi serta memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui program pengembangan data informasi/statistik daerah dan program perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Adanya data/informasi, menjadikan perencanaan yang dibuat menjadi terukur. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pembangunan daerah dilaksanakan program perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik yang senantiasa dipantau dan dikendalikan pelaksanaannya, diharapkan apa yang telah direncanakan dapat diwujudkan, dan target-target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022 Kecamatan Juai telah melaksanakan 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.4.142.452.353,00 dan serapan anggaran mencapai 95,25% atau sebesar Rp.3.945.858.150,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.3.607.013.150,00 atau 94,89% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.282.861.062 atau sekitar 92,66% dan belanja barang sebesar Rp. 1.324.152.088,00 atau sekitar 98,98 % serta belanja modal sebesar Rp.338.845.000,00 atau sekitar 99,37%. Data capaian target kinerja dan keuangan untuk tahun anggaran 2022 dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini.



**Tabel Capaian Realisasi Kinerja dan Keuangan Kecamatan Juai Tahun 2022**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi		
			Keuangan	Capaian Keuangan	Capaian Kinerja
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota</b>	<b>3.336.610.453</b>	<b>3.140.909.850</b>	<b>94,13%</b>	<b>105,59%</b>
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	55.396.700	55.116.700	99,49%	100%
1.1.1	<i>Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</i>	47.190.000	46.990.000	99,58%	100%
1.1.2	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD</i>	3.066.700	3.066.700	100,00%	100%
1.1.3	<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</i>	5.140.000	5.060.000	98,44%	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.542.847.953	2.357.497.662	92,71%	100%
1.2.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	2.463.681.353	2.282.861.062	92,66%	100%
1.2.2	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	79.166.600	74.636.600	94,28%	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.080.000	57.580.000	99,14%	100%
1.3.1	<i>Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan</i>	58.080.000	57.580.000	99,14%	100%
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	442.744.800	440.588.994	99,51%	100%
1.4.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan</i>	6.270.000	6.270.000	100,00%	100%

	<i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>				
1.4.2	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	341.000.000	338.845.000	99,37%	100%
1.4.3	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	28.399.800	28.399.000	100,00%	100%
1.4.4	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	67.075.000	67.074.994	100,00%	100%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	108.200.000	102.928.944	95,13%	100%
1.5.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat</i>	20.400.000	20.400.000	100,00%	100%
1.5.2	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	78.800.000	73.618.944	93,43%	100%
1.5.3	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	9.000.000	8.910.000	99,00%	100%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.341.000	127.197.550	98,34%	100%
1.6.1	<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	66.750.000	64.606.550	96,76%	100%
1.6.2	<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	62.591.000	62.591.000	100,00%	100%
<b>2.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>138.824.100</b>	<b>138.780.100</b>	<b>99,97%</b>	<b>100%</b>
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	138.824.100	138.780.100	99,97%	100%

	Dilimpahkan Kepada Camat				
2.1.1	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	138.824.100	138.780.100	99,97%	100%
<b>3.</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>32.897.200</b>	<b>32.887.200</b>	<b>99,97%</b>	<b>100%</b>
3.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.897.200	32.887.200	99,97%	100%
3.1.1	<i>Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	32.897.200	32.887.200	99,97%	100%
<b>4.</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>56.400.000</b>	<b>56.060.000</b>	<b>99,40%</b>	<b>100%</b>
4.1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	56.400.000	56.060.000	99,40%	100%
4.1.1	<i>Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	56.400.000	56.060.000	99,40%	100%
<b>5.</b>	<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>231.411.000</b>	<b>231.381.000</b>	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>
5.1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	231.411.000	231.381.000	99,99%	100%
5.1.1	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan</i>	231.411.000	231.381.000	99,99%	100%

	<i>Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal</i>				
<b>6.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>346.309.600</b>	<b>345.840.000</b>	<b>99,86%</b>	<b>100%</b>
6.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	346.309.600	345.840.000	99,86%	100%
6.1.1	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	<i>67.419.800</i>	<i>66.950.200</i>	<i>99,30%</i>	<i>100%</i>
6.1.2	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>258.000.000</i>	<i>258.000.000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100%</i>
6.1.3	<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>20.889.800</i>	<i>20.889.800</i>	<i>100,00%</i>	<i>100%</i>
<b>TOTAL</b>		<b>4.142.452.353</b>	<b>3.945.858.150</b>	<b>95,25%</b>	<b>100, 93%</b>

Dari rencana kerja tahun 2022 serta target dan realisasinya, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasannya hasil kinerja yang berupa output rata-rata 100% memenuhi target kinerja yang telah ditentukan. Tidak ada hasil kinerja/output yang tidak memenuhi target kinerja namun terdapat 1 (satu) capaian kinerja program yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Kabupaten Kota yang rasio capaiannya melebihi 100% yaitu 105,59% dengan perhitungan realisasi nilai LKIP 70,22 dari target 66,50.

Hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja renja Tahun 2022 Kecamatan Juai secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel T-C.29 di bawah ini.

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S/D Tahun 2023  
Kecamatan Juai Kabupaten Balangan**

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2023)	
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	<b>68.65 nilai</b>	<b>65,66</b>	<b>66,50</b>	<b>70,22</b>	<b>105,59%</b>	<b>67,00</b>	<b>70,22</b>	<b>102,29%</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	36 dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	50,00%

	Perangkat daerah yang disusun								
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan SKPD</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>50,00%</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen RKA dan DPA</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>50,00%</i>
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan</i>	<i>12 dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>100%</i>	<i>2 Dokumen</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>50,00%</i>
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Cakupan waktu pembayaran gaji dan tunjangan</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Pelaksanaan</i>	<i>Cakupan waktu</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>



<i>Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>pembayaran honorarium sesuai dengan beban kerja</i>								
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00%
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	50,00%
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Cakupan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>

	<i>bangunan kantor</i>								
<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Persentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Cakupan waktu penyediaan Barang cetakan dan penggandaan</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Cakupan waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi luar daerah</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyediaan Surat Menyurat</i>	<i>Cakupan waktu Pelayanan Administrasi</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>

	<i>Perkantoran</i>								
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Cakupan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>cakupan waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan</i>	<i>Cakupan waktu pemeliharaan kendaraan dinas / operasional</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>
<i>Pemeliharaan/</i>	<i>Cakupan waktu</i>	<i>72 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>12 bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 bulan</i>	<i>36 bulan</i>	<i>50,00%</i>

<i>Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	<i>pemeliharaan gedung kantor</i>								
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	<i>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	<i>Persentase pelaksanaan pelayanan yang dilimpahkan ke kecamatan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase koordinasi pemberdayaan</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

	masyarakat desa								
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	<i>Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa</i>	<i>6 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>100%</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>3 kegiatan</i>	<i>50,00%</i>
<b>Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi</i>	<i>Jumlah pelaksanaan forum komunikasi pimpinan di wilayah</i>	<i>6 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>100%</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>3 kegiatan</i>	<i>50,00%</i>

<i>Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	<i>kecamatan</i>								
<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi umum</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak</i>	<i>24 kegiatan</i>	<i>4 kegiatan</i>	<i>4 kegiatan</i>	<i>4 kegiatan</i>	<i>100%</i>	<i>4 kegiatan</i>	<i>12 kegiatan</i>	<i>50,00%</i>



	<i>Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal</i>								
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pdayagunaan Aset Desa</i>	<i>Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa lengkap</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
<i>Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan</i>	<i>Persentase fasilitasi</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

<i>Perangkat Desa</i>	<i>pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa</i>								
<i>Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif</i>	<i>Persentase desa yang menyampaikan usulan musyawarah pembangunan desa tepat waktu</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Misi pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu **“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”** maka dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Juai akan mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan di lingkungan wilayah Kecamatan Juai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik serta misi nomor lima yaitu mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif dengan cara meningkatkan kemandirian desa lingkup Kecamatan Juai.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut di atas maka Kecamatan Juai selaku pemangku urusan pemerintahan unsur kewilayahan perlu menentukan tujuan dan sasaran berserta indikator pengukur yang mendukung pencapaian target tersebut sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen Renstra SKPD Kecamatan Juai tahun 2021 – 2026 pada tabel T-C.25 yaitu sebagai berikut :

**Tabel T-C.25**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Juai**

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Juai	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Juai	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,50 %	87,55 %	87,60 %	87,65 %	87,70 %	87,75 %
Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,638 9	0,638 9	0,639 0	0,639 0	0,639 1	0,639 1

Sedangkan untuk realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel T-C.30 di bawah ini.

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Juai  
Kabupaten Balangan**

No.	Indikator	S P M	I K K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai IKM	-	-	87,50	87,55	87,60	87,65	85,65	87,59	87,60	87,65	
2	Skor IDM Desa	-	-	0,6389	0,6389	0,6390	0,6390	0,6389	0,6693	0,6793	0,6893	

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diperoleh dari nilai rata-rata IKM semester 1 dan 2 tahun bersangkutan yang merupakan hasil dari perhitungan survey yang dilakukan Seksi Pelayanan Publik terhadap 25 (dua puluh lima) orang responden per 6 (enam) bulan atau 1 (satu) semester. Sedangkan Skor Indeks Desa Membangun (IDM) diperoleh dari rata-rata nilai perolehan IDM 21 (dua puluh satu) desa di Kecamatan Juai yang didapat dari hasil penilaian terhadap data isian kuisioner yang diberikan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Republik Indonesia kepada seluruh desa dalam Wilayah Kecamatan Juai untuk 1 (satu) tahun.

Formula yang dipergunakan dalam melakukan penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebagai berikut :

<b>Formula Perhitungan</b>
Total Nilai IKM yang dicapai Semester 1 dan 2
2

Sedangkan untuk Skor Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut :

<b>Formula Perhitungan</b>
Total Skor IDM Seluruh Desa
Jumlah Desa

Terkait dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), maka hal tersebut sebagai bentuk penjabaran terhadap Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Sebagian Kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat adalah :

- a. Bidang Perizinan, meliputi :
  1. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  2. Legalisasi Pembuatan Surat Izin Usaha Perdagangan
  3. Legalisasi Pembuatan Izin Gangguan (HO)
  4. Legalisasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  5. Rekomendasi Izin Keramaian
  6. Penerbitan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- b. Bidang Non Perizinan, meliputi :
  1. Fasilitasi Perekaman Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  2. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  3. Legalisasi/Rekomendasi Proposal Desa/Kelompok/ Organisasi Kemasyarakatan
  4. Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK dan lainnya
  5. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
  6. Legalisasi Surat Domisili Penduduk
  7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
  8. Pembuatan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan Dalam Kabupaten

9. Legalisasi Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
11. Fasilitasi Surat Kematian.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Juai maka perlu dilakukan analisis terhadap organisasi perangkat daerah untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis perangkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang mengurus tentang pelayanan terhadap masyarakat suatu wilayah yang dalam hal ini masyarakat Kecamatan Juai maka peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prioritas utama dari penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Juai. Ketika pelayanan publik di kecamatan terlaksana dengan baik dan lancar maka akan berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan pemerintah kabupaten balangan khususnya di Kecamatan Juai.

Selain sebagai penyedia layanan publik masyarakat, kecamatan juga memiliki tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan serta ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat di kecamatan. Artinya segala hal yang berkaitan dengan desa baik yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban di desa menjadi tanggung jawab kecamatan. Begitu pula halnya dengan pembinaan dan pengawasan (evaluasi) pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil analisa atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Juai sebagaimana yang dijelaskan di atas maka dapat disimpulkan/diidentifikasi berberapa permasalahan yang mungkin menghambat pencapaian tujuan SKPD di Kecamatan Juai yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya petugas pelayanan yang berkompeten
2. Kurangnya dana tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan baik sarana prasarana, SDM petugas layanan maupun SDM penerima layanan.
3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik
4. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada kecamatan belum seluruhnya dilakukan dengan baik
5. Pengelolaan tingkat kemandirian desa belum dilaksanakan secara baik khususnya dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi



6. Peningkatan kapasitas SDM perencana dan pelaksana pembinaan, monitoring dan evaluasi pemerintahan desa.

Selain permasalahan yang mungkin menghambat pencapaian target tujuan SKPD, Kecamatan Juai selaku SKPD yang mengampu urusan unsur kewilayahan dan bertugas menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan publik di lingkup Kecamatan Juai maka terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Juai yaitu :

1. Semakin tingginya tuntutan dari masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang baik dan transparan.
2. Adanya tuntutan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun yang benar dan tepat waktu serta mudah diakses oleh masyarakat.
3. Adanya ekspektasi masyarakat agar pemerintah daerah semakin aktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan teridentifikasinya permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi maka Kecamatan Juai dapat menetapkan solusi atas permasalahan dan tantangan tersebut dengan menentukan peluang atau faktor pendukung pencapaian target tujuan SKPD yaitu sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu pihak pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur, bersih, dan berwibawa.
2. Adanya Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi).
3. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup.
4. Tersedianya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompeten, baik dari segi jumlah maupun tingkat pendidikan.
5. Adanya pelatihan peningkatan SDM / penjenjangan karir.
6. Adanya digitalisasi sistem perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan melalui aplikasi yang terintegrasi dengan pembangunan pemerintah daerah.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan rancangan awal RKPD Kecamatan Juai sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra Kecamatan Juai Tahun 2021-2026 maka dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Juai tahun 2024 terdapat 6 (enam) program yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan. Namun dengan adanya hasil verifikasi atas mapping perubahan indikator sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 pada tanggal 26 Maret 2022 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Juai dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan serta adanya rencana agenda revisi atas Renstra 2021-2026 yang akan dilaksanakan di tahun 2023 maka jumlah usulan kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Juai berubah sejak RKPD Tahun 2023 dan seterusnya. Untuk kegiatan Kecamatan Juai tahun 2024 diusulkan perencanaan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan. Dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan hasil analisa dimaksud, diharapkan Target Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja) 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dapat dicapai. Hal ini tentunya akan berimbas kepada pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Untuk menyikapi hal ini, Kecamatan Juai akan terus melakukan koordinasi terutama dengan Bappedalitbang Kabupaten Balangan. Sehingga nantinya apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan. Sikap Kecamatan Juai terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.31 di bawah ini :

**Tabel T-C.31**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kabupaten Balangan**

SKPD : Kecamatan Juai

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Balangan	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	67,00	<b>3.514.256.000,00</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kab. Balangan	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	67,00	<b>4.714.099.500,00</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun</b>	6 dokumen	<b>46.000.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun</b>	6 dokumen	<b>266.192.400,00</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	2 dokumen	<b>36.000.000,00</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	2 dokumen	<b>103.945.600,00</b>	

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	61.115.600,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	101.131.200,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12 Bulan	2.807.956.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	12 Bulan	2.945.565.600,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Balangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang per bulan	2.755.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang per bulan	2.755.000.000,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Balangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	4 Dokumen	52.956.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	190.565.600,00	

		<b>Keuangan SKPD</b>						n		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	12 Bulan	<b>57.000.000,00</b>	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	12 Bulan	<b>231.600.000,00</b>	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	15 Orang	<b>57.000.000,00</b>	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	15 Orang	<b>231.600.000,00</b>	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	<b>123.100.000,00</b>	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	12 Bulan	<b>566.525.400,00</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	1 Paket	<b>6.500.000,00</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Balangan	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	1 Paket	<b>16.797.000,00</b>	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	1 Paket	<b>10.000.000,00</b>	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	1 Paket	<b>292.600.000,00</b>	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</b>	1 Paket	<b>39.600.000,00</b>	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</b>	1 Paket	<b>111.668.400,00</b>	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan</b>	1 Laporan	<b>67.000.000,00</b>	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan</b>	1 Laporan	<b>145.460.000,00</b>	

		<b>Konsultasi SKPD</b>					<b>Konsultasi SKPD</b>			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 Bulan	<b>236.280.000,00</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 Bulan	<b>295.217.700,00</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	1 Laporan	<b>58.080.000,00</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	1 Laporan	<b>98.665.700,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	12 Laporan	<b>151.800.000,00</b>	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	12 Laporan	<b>148.800.000,00</b>	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	1 Laporan	<b>26.400.000,00</b>	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	1 Laporan	<b>47.752.000,00</b>	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	12 Bulan	<b>243.920.000,00</b>	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Balangan	<b>Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	12 Bulan	<b>408.998.400,00</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</b>	13 Unit	<b>104.000.000,00</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</b>	13 Unit	<b>243.441.000,00</b>	



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	139.920.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Balangan	Jumlah Gedung dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	165.557.400,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Balangan	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	73.260.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kab. Balangan	Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	674.137.100,00	
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Balangan	Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	73.260.000,00	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kab. Balangan	Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	613.587.100,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	73.260.000,00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	60.550.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Balangan	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kab. Balangan	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	100%	60.550.000,00	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	1 Laporan	<b>8.700.400</b>	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Balangan	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>	100 %	<b>97.240.000,00</b>	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kab. Balangan	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>	100 %	<b>694.269.400,00</b>	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Balangan	<b>Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa</b>	100%	<b>63.890.000,00</b>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kab. Balangan	<b>Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa</b>	100%	<b>363.526.600,00</b>	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	4 Lembaga Kemasyarakatan	<b>26.400.000,00</b>	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	4 Lembaga Kemasyarakatan	<b>132.871.200,00</b>	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</b>	1 Dokumen	<b>8.450.000,00</b>	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</b>	1 Dokumen	<b>69.911.200,00</b>	

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	1 Laporan	<b>29.040.000,00</b>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	1 Laporan	<b>160.744.200,00</b>	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Balangan	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	100%	<b>33.350.000,00</b>	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kab. Balangan	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	100%	<b>330.742.800,00</b>	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Balangan	<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	50 keluarga	<b>26.400.000,00</b>	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Balangan	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	100%	<b>222.386.200,00</b>	
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Balangan	<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan</b>	50 Keluarga	<b>6.950.000,00</b>	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kab. Balangan	<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan</b>	50 Keluarga	<b>108.356.600,00</b>	

		<b>Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</b>					<b>Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</b>			
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Balangan	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	<b>80.520.000,00</b>	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kab. Balangan	Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketenteraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	<b>582.579.800,00</b>	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Balangan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	<b>80.520.000,00</b>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kab. Balangan	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	<b>582.579.800,00</b>	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	<b>40.920.000,00</b>	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	<b>281.360.200,00</b>	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	<b>39.600.000,00</b>	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		<b>301.219.600,00</b>	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kab. Balangan	Persentase desa tertib administrasi umum ab. Balangan	100%	<b>52.162.150,00</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN	Kab. Balangan	Persentase desa tertib administrasi umum ab. Balangan			

PEMERINTAHAN UMUM					PEMERINTAHAN UMUM					
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Balangan	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah</b>	100%	<b>52.162.150,00</b>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kab. Balangan	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah			
Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</b>	1 Dokumen	<b>52.162.150,00</b>	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal</b>			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Balangan	<b>Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa</b>	100%	<b>128.420.000,00</b>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kab. Balangan	<b>Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa</b>	100%	<b>835.566.100,00</b>	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	<b>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	100%	<b>128.420.000,00</b>	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	<b>Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	100%	<b>835.566.100,00</b>	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata</b>	1 Dokumen	<b>27.720.000,00</b>	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan</b>	1 Dokume	<b>117.690.000,00</b>	

		<b>Pemerintahan Desa</b>					<b>Desa</b>	n		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>	1 Dokumen	<b>49.482.600</b>	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>	1 Dokumen	<b>59.602.600</b>	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	1 Dokumen	<b>6.850.000,00</b>	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>	1 Dokumen	<b>18.692.800,00</b>	
Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</b>	1 Dokumen	<b>5.450.000,00</b>	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	1 Dokumen	<b>17.560.000,00</b>	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>	1 Dokumen	<b>13.200.000,00</b>	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</b>	1 Dokumen	<b>21.404.900,00</b>	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan</b>	1 Dokumen	<b>28.380.000,00</b>	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Kab. Balangan	<b>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan</b>	1 Dokumen	<b>82.738.400,00</b>	

Partisipatif		<b>Pembangunan Partisipatif</b>			Partisipatif		<b>Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>	n		
				<b>3.945.858.150,00</b>					<b>7.500.651.900,00</b>	

Setelah dilakukan analisa terhadap kebutuhan maka ada beberapa Sub Kegiatan pada Rancangan Awal yang berubah dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan yang menjadi keputusan bersama lintas sektor di Kabupaten Balangan misalnya mengenai penganggaran untuk kegiatan tapal batas pada sub kegiatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa dimana diberikan dana penambahan untuk mengakomodir kebijakan seluruh desa harus menetapkan batas antar desa mulai dari tahun 2022 dan diharap selesai di tahun 2024.
2. Adanya kenaikan pagu untuk pembayaran belanja rutin seperti tunjangan tambahan penghasilan pegawai, kenaikan harga BBM dan peningkatan jumlah THL di Kecamatan Juai beserta besaran penggajiannya.

## **2.5 Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, Asosiasi-asosiasi maupun SKPD lain yang terkait langsung dengan program kegiatan masyarakat diperoleh saat Musrenbang Kecamatan Juai yang dilaksanakan tanggal Januari 2023, untuk dirangkum dan selanjutnya disampaikan ke SKPD yang terkait. Namun untuk usulan tersebut masyarakat wilayah Kecamatan Juai melalui Musrenbang desa atau Musrenbang Tingkat Kecamatan, sebagian besar usulan program/kegiatan didominasi oleh kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan lain-lain. Sehingga yang paling berperan dalam artian SKPD penanggung jawabnya adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Dinas Peternakan, Kecamatan Juai, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Kecamatan juai dalam hal usulan ini, ada beberapa usulan yang program yang dapat dikaji atau ditelaah oleh dinas terkait dengan pagu yang disusun oleh masing – masing dan untuk program/kegiatan yang ada tetap bersifat rutin dan pelayanan untuk menunjang pencapaian target kinerja SKPD Kecamatan Juai. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel T-C.32**

**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

**Musrenbang Kecamatan Juai Tahun 2023 Untuk Perencanaan Tahun 2024**

No	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa)	Volume	Pagu (Rp)	Penanggungjawab
1.	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan box culvet 4x7	Masyarakat	Desa Bata RT.2 dan RT.1 Kec. Juai		Rp.800.000.000	Dinas PUPR Perkim
2	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan)	Peninggian jalan raya cor beton	Masyarakat	Desa Bata RT.2 dan RT.1 Kec. Juai		Rp.1.000.000.000	Dinas PUPR Perkim
3	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan beronjong	Masyarakat	Desa Bata RT.1 Kec. Juai		Rp.200.000.000	Dinas PUPR Perkim
4.	Infrastruktur Pedesaan dan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan jembatan gantung	Masyarkat	Desa Buntu Karau RT.1 Kec. Juai		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim

	Perkotaan	Infrastruktur Publik							
5.	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan siring jalan	Masyarkat	Desa Bata RT.1 Kec. Juai		Rp.180.000.000	Dinas PUPR Perkim
6	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rehap penggilingan padi	Masyarkat	Desa Bata RT.1 Kec. Juai		Rp.150.000.000	Dinas Pertanian
7	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah	Pembuatan gedung TK	Masyarkat	Desa Bata RT.1 Kec. Juai		Rp.150.000.000	Dinas Pendidikan
8	Infrastruktur Pedesaan dan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan pembuatan	Masyarakat	Desa Bata RT.2 Kec. Juai		Rp.200.000.000	Dinas PUPR Perkim

	Perkotaan	Infrastruktur Publik		beronjong					
9	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mesin comben	Masyarakat	Desa Bata RT.2 dan RT.1 Kec. Juai		Rp.500.000.000	Dinas Pertanian
10	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat	Desa Teluk Bayur RT. 01, 02, 03 dan 04 Kecamatan Juai		Rp. 1.000.000.000	Dinas PUPR Perkim
11	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Rumah Tidak Layak Huni	Masyarakat	Desa Teluk Bayur RT. 01 Kecamatan Juai		Rp. 300.000.000	Dinas PUPR Perkim
12	Ekonomi Kerakyatan Berbasis	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembuatan JUT Piah	Masyarakat	Desa Teluk Bayur RT. 01 Kecamatan Juai		Rp. 200.000.000	Dinas Pertanian

	Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif								
13	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembuatan JUT Tanjungan	Masyarakat	Desa Teluk Bayur RT. 01 Kecamatan Juai		Rp. 200.000.000	Dinas Pertanian
14	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana	Perahu Fiber	Masyarakat	Desa Teluk Bayur RT. 01 Kecamatan Juai		Rp. 400.000.000	BPBD
15	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Pengembangan Sistem Drainase	Pengaspalan Jalan Desa dan Derainase	Masyarakat	Desa Pamurus RT. 01 dan 02 Kecamatan Juai		Rp. 800.000.000	Dinas PUPR Perkim
16	Infrastruktur	Meningkatnya	Program Penyelenggaraan	Pengecoran Jalan	Masyarakat	Desa Pamurus RT.		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR

	Pedesaan dan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Jalan	Lingkungan Desa		01 Kecamatan Juai			Perkim
17.	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Pagar Pembatas Area Makam	Masyarakat	Desa Pamurus RT. 02 Kecamatan Juai		Rp. 300.000.000	Setda
18	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Cor Lapangan Futsal	Masyarakat	Desa Pamurus RT. 01 Kecamatan Juai		Rp .250.000.000	Dispora
19	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung Serbaguna (Olahraga)	Masyarakat	Desa Pamurus RT. 01 Kecamatan Juai		Rp. 450.000.000	Dispora
20	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perhubungan	Pengadaan PJU	Masyarakat	Desa Pamurus RT. 01, 02 dan 03 Kecamatan Juai		Rp. 750.000.000	Dinas Perhubungan
21	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pengerokkan Sungai	Masyarakat	Desa Pamurus RT. 01 dan 02 Kecamatan Juai		Rp. 600.000.000	Dinas PUPR Perkim
22	Infrastruktur	Meningkatnya	Program Penyelenggaraan	Pembangunan/	Masyarakat	Desa Marias		Rp. 250.000.000	Dinas PUPR

	Pedesaan dan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Sumber Daya Air (SDA)	Titian sambungan jembatan gantung (pundasi)		RT.02			Perkim
23	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Peningkatan jalan produksi	Masyarakat	Desa Marias RT.01		Rp. 4.000.000.000	Dinas Pertanian
24	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata	Lanjutan wisata	Masyarakt	Desa Marias RT.03		Rp. 2.000.000.000	Dinas Pariwisata
25	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata	Pembuatan gedung futsal	Masyarakt	Desa Marias RT.01		Rp. 870.000.000	Dispora
26	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Bronjong Ujung Drainase Penahanan Dinding Sungai	Masyarakat	Desa Marias RT.01		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim
27	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur	Program Penataan Bangunan Gedung	Gudang Aset Kuburan Muslimin	Masyarakat	Desa Marias RT.02		Rp. 100.000.000	Setda

		Permukiman							
28	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan TPA	Masyarakat	Desa Marias RT.03		Rp. 250.000.000	Setda
29	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan gedung posyandu	Masyarakat	Desa Tigarun RT.02		Rp. 200.000.000	Dinas Kesehatan
30	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan gedung serbaguna buat Musdes untuk mengumpulkan orang banyak dalam ruangan (Pertemuan- pertemuan dengan masyarakat)	Masyarakat	Desa Tigarun RT.02		Rp. 180.000.000	Dinas PUPR Perkim
31	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan gedung bulu tangkis	Masyarakat	Desa Tigarun RT.01		Rp. 300.000.000	Dispora

32	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan jalan usaha tani	Masyarakat	Desa Tigarun RT.01 dan 02		Rp. 600.000.000	Dinas Pertanian
33	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan drainase	Masyarakat	Desa Tigarun RT.01 dan 02		Rp. 100.000.000	Dinas PUPR Perkim
34	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah	Pembuatan fasilitas parkir SD Gulinggang 1	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.02 dan 03		Rp. 50.000.000	Dinas Pendidikan
35	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan jalan usaha tani	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.01, 02 dan 03		Rp. 600.000.000	Dinas Pertanian
36	Infrastruktur Pedesaan dan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan gedung olahraga	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.01		Rp. 300.000.000	Dispora



	Perkotaan	Infrastruktur Publik							
37	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan perpustakaan desa	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.03		Rp. 100.000.000	Dinas Perpustakaan
38	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengembangan Lahan Pertanian	Pembukaan lahan tidur persawahan	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.02		Rp . 49.000.000	Dinas Pertanian
39	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.01		Rp. 50.000.000	Dinas PUPR Perkim
40	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan saluran air persawahan baru (irigasi)	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.03		Rp. 120.000.000	Dinas PUPR Perkim
41	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembangunan saluran drainase gorong-gorong	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.01, 02 dan 03		Rp. 150.000.000	Dinas PUPR Perkim
42	Ekonomi	Meningkatnya	Program Penyediaan	Pengadaan bibit	Masyarakat	Desa Gulinggang		Rp. 50.000.000	Dinas Pertanian

	Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	Bahan Pertanian	dan pupuk Urea/Poska Untuk Pertanian		RT.01, 02 dan 03			
43	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Bahan Peternakan	Bantuan bibit ternak sapi dan ternak itik	Masyarakat	Desa Gulinggang RT.01, 02 dan 03		Rp. 100.000.000	Dinas PUPR Perkim
44	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Penambahan ruangan kantor desa	Masyarakat	Desa Juai RT.04		Rp. 300.000.000	Dinas PUPR Perkim
45	Infrastruktur Pedesaan dan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan JUT Liu Padang	Masyarakat	Desa Juai RT.01		Rp. 700.000.000	Dinas PUPR Perkim

	Perkotaan	Infrastruktur Publik							
46	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana	Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Tanggap Bencana	Pembuatan posko banjir/ pengungsian	Masyarakat	Desa Juai RT.01, 02, 03 dan 04		Rp. 500.000.000	BPBD
47	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan JUT jaturaan	Masyarakat	Desa Juai RT.03		Rp. 200.000.000	Dinas Pertanian
48	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Perbaikan JUT kadam hilir	Masyarakat	Desa Juai RT.01		Rp. 200.000.000	Dinas Pertanian
49	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaran Sumber Daya Air (SDA)	Peninggian jembatan tangkarawak Jalan Tangkarawak Menuju Sungai	Masyarakat	Desa Juai RT.03		Rp. 150.000.000	Dinas PUPR Perkim
50	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaran Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan siring beronjong	Masyarakat	Desa Juai RT.01		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim
51	Infrastruktur	Meningkatnya	Program Penataan	Pembangunan	Masyarakat	Desa Penimbaan		Rp. 199.000.000	Setda

	Pedesaan dan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Bangunan Gedung	Gedung TPA		RT.02			
52	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Rehap langgar nurul ibadah	Masyarakat	Desa Penimbaan RT.01		Rp. 199.000.000	Setda
53	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan pagar kuburan muslimin	Masyarakat	Desa Penimbaan RT.01		Rp. 300.000.000	Setda
54	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan gedung serbaguna untuk Olahraga	Masyarakat	Desa Penimbaan RT.02		Rp. 400.000.000	Dinas PUPR Perkim
55	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Bahan Peternakan	Kolam budidaya ikan bio flok	Masyarakat	Desa Penimbaan RT.02		Rp. 190.000.000	Dinas Perikanan

56	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Perbaiki jalan provinsi ( Jalan A.Yani) Jalan Raya	Masyarakat	Desa Penimbaan RT.01 dan 02		Rp. 5.000.000.000	Dinas PUPR Perkim
57	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Alternatif Cor Beton	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT.01, 02, 03 dan 04		Rp. 250.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
58	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Ulin Persawahan	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT.04 dan 06		Rp. 350.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
59	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaran Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Siring Ulin disamping jembatan	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 06		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim
60	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaran Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Jembatan Gantung	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 03		Rp. 500.000.000	Dinas PUPR Perkim
61	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan Pagar Beton kuburan muslimin	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 03		Rp. 200.000.000,00	Setda

62	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Dreinase Saluran Air (Halan Rumah)	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 04		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
63	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Dreinase Saluran Air (Jalur Ke Sungai)	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 04		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
64	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Produksi Cor Beton Padang Bilum	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 04		Rp. 350.000.000,00	Dinas Pertanian
65	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Cor Beton Akses ke Persawahan	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 06		Rp. 250.000.000,00	Dinas Pertanian
66	Infrastruktur Pedesaan dan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Program Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana	Pengadaan Alat Bermain/Edukasi TK dan Paud	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 02 dan 04		Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan

	Perkotaan	Infrastruktur Publik	Pendidikan						
67	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	rumah tahfiz	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 02 dan 04		Rp. 200.000.000,00	Setda
68	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembuatan Gedung Puskesmas	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 06		Rp. 150.000.000,00	Dinas Kesehatan
69	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Saluran Irigasi	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 02		Rp. 100.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
70	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Cor Beton Tembok Lama	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 03		Rp. 250.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
71	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	pembangunan MI miftahudin dan tempat ibadah	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 01		Rp. 316.000.000,00	Dinas Pendidikan
72	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Jembatan Ulin Penyebrangan	Masyarakat	Desa Buntu Karau RT. 03		Rp. 150.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

73	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan muara jembata murung	Masyarakat	Desa Hukai RT. 01		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim
74	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Peningkatan jembatan sungai hukai	Masyarakat	Desa Hukai RT. 01		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim
75	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan gang Pa.amin	Masyarakat	Desa Hukai RT. 01		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim
76	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Jembatan gantung	Masyarakat	Desa Hukai RT. 02		Rp. 200.000.000	Dinas PUPR Perkim
77	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Jembatan paring manis	Masyarakat	Desa Hukai RT. 02		Rp. 150.000.000	Dinas PUPR Perkim
78	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pengerokan baruh Hukai	Masyarakat	Desa Hukai RT. 01		Rp. 500.000.000	Dinas PUPR Perkim



79	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan tempat posyandu	Masyarakat	Desa Hukai RT. 03		Rp. 200.000.000	Dinas Kesehatan
80	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan	Pembangunan TPS3R	Masyarakat	Desa Hukai RT. 01		Rp. 600.000.000,00	Dinas LH
81	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Drainase	Masyarakat	Desa Hukai RT. 01		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
82	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Barai RT 2 Cor Beton	Masyarakat	Desa Sirap RT. 02		Rp. 500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
83	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Jembatan Cor Box Calpit Sungai Bilum	Masyarakat	Desa Sirap RT. 03		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
84	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Bronjung Tepi Sungai Balangan Desa Sirap	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01 dan 04		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

85	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Jembatan Gantung Desa Sirap RT 1	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
86	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Jembatan Gantung Desa Sirap RT 4	Masyarakat	Desa Sirap RT. 04		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
87	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan Parit RT 1, RT 2, RT 3, RT 4	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01, 02, 03 dan 04		Rp. 500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
88	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Pruduksi Cor Beton Bara'i Desa Sirap RT 3	Masyarakat	Desa Sirap RT. 03		Rp. 400.000.000,00	Dinas Pertanian
89	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mengadaan Traktor Pembajak Sawah 5 Buah	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01, 02, 03 dan 04		Rp. 125.000.000,00	Dinas Pertanian

	Ekonomi Kreatif								
90	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan Alat Mutur Combin Padi 2 Buah	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01, 02, 03 dan 04		Rp. 600.000.000,00	Dinas Pertanian
91	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Rehab Total Ruang Kelas TK Desa Sirap	Masyarakat	Desa Sirap RT. 03		Rp. 200.000.000,00	Dinas Pendidikan
92	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Bahan Pertanian	Pengadaan Obat Dan Pupuk Padi Dan Sayuran	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01, 02, 03 dan 04		Rp. 150.000.000,00	Dinas Pertanian

93	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pagar Kuburan Muslimin RT 2	Masyarakat	Desa Sirap RT. 02		Rp. 200.000.000,00	Setda
94	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Persampahan	Pengadaan Tanah TPS Sampah Desa Sirap	Masyarakat	Desa Sirap RT. 02		Rp. 300.000.000,00	Dinas LH
95	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perhubungan	Lampu Tenaga Surya 10 Titik	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01, 02, 03 dan 04		Rp. 150.000.000,00	Dinas Perhubungan
96	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Lingkungan Cor Beton Desa Sirap RT 1	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
97	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Kuburan Muslimin Cor Beton Desa Sirap RT 2	Masyarakat	Desa Sirap RT. 02		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
98	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Lingkungan Cor Beton Desa Sirap RT 3	Masyarakat	Desa Sirap RT. 03		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

99	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Lingkungan Cor Beton Desa Sirap RT 4	Masyarakat	Desa Sirap RT. 04		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
100	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan Jalan Pruduksi Garonggang Desa Sirap RT 1	Masyarakat	Desa Sirap RT. 01		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
101	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung Posyandu	Masyarakat	Desa Sirap RT. 03		Rp. 200.000.000,00	Dinas Kesehatan
102	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaran Sumber Daya Air (SDA)	Normalisasi Cekdam	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT. 14, 08 dan 06		Rp. 500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
103	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaran Sumber Daya Air (SDA)	Pembangunan Jembatan Box Culvaret	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT. 05, 06 dan 13		Rp. 600.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
104	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengecoran jalan antar RT	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.06 dan 14		Rp. 400.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

105	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perhubungan	PJU Konvensional	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.03 dan 15		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
106	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Perbaikan Pintu Air Cekdam	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.06 dan 14		Rp. 400.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
107	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Bahan Peternakan	Pengadaan sarpras peternakan	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.01 s.d 15		Rp. 750.000.000,00	Dinas Pertanian
108	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengadaan sarpras pertanian	Masyarakat	Dusun 6 dan 7		Rp. 300.000.000,00	Dinas Pertanian

	Pariwisata serta Ekonomi Kreatif								
109	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pembangunan/per baikan Lapangan Sepak Bolap	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.10		Rp. 200.000.000,00	Dispora
110	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pelebaran Jalan Poros Desa	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.06 dan 14		Rp. 10.000.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
111	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata	Pengadaan sound sistem	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.03		Rp. 400.000.000,00	Dinas Pariwisata
112	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Wisata	Gamelan komplit kuda lumping	Masyarakat	Desa Sumber Rezeki RT.08		Rp. 200.000.000,00	Dinas Pariwisata
113	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan Tembok Lama	Masyarakat	Desa Muara Ninian RT.01		Rp. 150.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
114	Infrastruktur	Meningkatnya	Program Penyelenggaran	Bok Carpet	Masyarakat	Desa Muara		Rp. 100.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

	Pedesaan dan Perkotaan	Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Sumber Daya Air (SDA)			Ninian RT.01			
115	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	JUT Pertanian	Masyarakat	Desa Muara Ninian RT.01		Rp. 100.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
116	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	JUT Pertanian	Masyarakat	Desa Muara Ninian RT.02		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
117	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	JUT Pertanian	Masyarakat	Desa Muara Ninian RT.03		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
118	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembangunan JUT karukan	Masyarakat	Desa Hamarung RT.02		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
119	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Drainase	Masyarakat	Desa Hamarung RT.01, 02 dan 03		Rp.300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
120	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung posyandu	Masyarakat	Desa Hamarung RT.03		Rp. 100.000.000,00	Dinas Kesehatan



	Perkotaan	Infrastruktur Publik							
121	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Bendungan/pengairan sawah sungai rumbia	Masyarakat	Desa Hamarung RT.02		Rp. 500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
122	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan Bahan Perkebunan	Bantuan bibit obat dan pupuk perkebunan	Masyarakat	Desa Hamarung RT.01, 02 dan 03		Rp. 80.000.000,00	Dinas Pertanian
123	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan jalan	Masyarakat	Desa Lalayau RT.02		Rp. 500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
124	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Penambahan bronjong jembatan	Masyarakat	Desa Lalayau RT.04		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
125	Ekonomi	Meningkatnya	Program Penyediaan dan	Lambatnya proses panen padi karena kurangnya alat	Masyarakat	Desa Lalayau		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

	Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan Prasarana Pertanian	pertanian		RT.01, 02, 03, 04 dan 05			
126	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Perpanjangan jembatan	Masyarakat	Desa Lalayau RT.04		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
127	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan drainase tepi jalan raya	Masyarakat	Desa Mungkur Uyam RT.04		Rp. 250.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
128	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Perbaikan drainase jalan kenangan lama	Masyarakat	Desa Mungkur Uyam RT.02		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
129	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan jembatan ulin	Masyarakat	Desa Mungkur Uyam RT.04		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

130	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pembuatan jalan lingkungan	Masyarakat	Desa Mungkur Uyam RT.04		Rp. 2.500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
131	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Pagar Kubur Muslimin	Masyarakat	Desa Sungai Batung RT.01		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
132	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Atap Kolam Pemancingan	Masyarakat	Desa Sungai Batung RT.03		Rp. 150.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
133	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Drainase	Masyarakat	Desa Sungai Batung RT.02		Rp. 500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
134	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Bronjong	Masyarakat	Desa Sungai Batung RT.03		Rp. 400.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
135	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penataan Bangunan Gedung	Gedung Serba Guna Buat Olahraga	Masyarakat	Desa Sungai Batung RT.03		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

136	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan jalan poros trans	Masyarakat	Desa Tawahan RT. 04		Rp. 4.500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
137	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembuatan drainase	Masyarakat	Desa Tawahan RT.01, 02, 03 dan 04		Rp. 1.000.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
138	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Perhubungan	Penerangan jalan desa	Masyarakat	Desa Tawahan RT.01, 02, 03 dan 04		Rp. 175.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
139	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan irigasi	Masyarakat	Desa Tawahan RT.01, 02, 03 dan 04		Rp. 300.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
140	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyelenggaraan Jalan	JUT PERTANIAN	Masyarakat	Desa Mihu		Rp. 500.000.000,00	Dinas Pertanian

	Ekonomi Kreatif								
141	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Pagar Kuburan Muslimin	Masyarakat	Desa Mihu RT.05		Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
142	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Bedah Rumah	Masyarakat	Desa Mihu RT.02/03		Rp. 100.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	Program Penataan Bangunan Gedung	Perbaikan langgar	Masyarakat	Desa Mihu RT.04		Rp. 50.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
	Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pertanian, Perkebunan, dan Pariwisata serta	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Mesin traktor dan mesin pemotong padi	Masyarakat	Desa Mihu RT.01		Rp. 100.000.000,00	Dinas Pertanian

	Ekonomi Kreatif								
	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air (SDA)	Pembuatan Siring Permanen	Masyarakat			Rp. 750.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Penyelenggaraan Jalan	Pengaspalan Jalan Dari RT 2 Sampai RT 3	Masyarakat			Rp. 500.000.000,00	Dinas PUPR Perkim
	Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Gorong Gorong dan Drainase RT 3	Masyarakat			Rp. 200.000.000,00	Dinas PUPR Perkim

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pada dasarnya kebijakan nasional bersifat makro, baik itu dalam pembangunan maupun perekonomian. SKPD Kecamatan Juai dalam menentukan prioritas program/kegiatan lebih mengutamakan perbaikan kelembagaan sebagai modal awal mendukung lancarnya proses pelayanan. Secara kasat mata, program/kegiatan SKPD Kecamatan Juai keluar dari kebijakan nasional, namun secara filosofi tetap berada digaris depan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Tujuan renja SKPD pada dasarnya sama dengan tujuan Renstra SKPD, yaitu :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Juai Tahun 2024
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Juai Tahun 2024
3. Memberikan pedoman dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Tahun 2024
4. Terciptanya suasana lingkungan yang kondusif.

Berdasarkan evaluasi kinerja pada tahun 2022, maka jika dilihat secara riil tujuan dari Renstra SKPD ini berjalan dengan lancar, sebab program/kegiatan yang dicanangkan merupakan penjabaran dari Renstra yang ada, sehingga terjadi sinkronisasi yang tentu diharapkan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur serta Sarana dan Prasarana pendukungnya.
2. Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan.

Tujuan dan Sasaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2024 terkait dengan Tugas Fungsi Kecamatan Juai, didasarkan kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Juai Tahun 2021-2026. Dengan tetap memperhatikan Program Prioritas yang telah dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan sesuai dengan Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026, yaitu

“Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara” dan Visi V “Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif”. Dengan Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” dan “Meningkatnya Nilai Indeks Desa Membangun”. Adapun yang menjadi Sasaran adalah “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi” dan “Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan”. Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, selanjutnya dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Juai Tahun 2021-2026 dan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dan “Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan”. Untuk Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, maka Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Juai adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Juai**

Misi IV Bupati Balangan Tahun 2021-2026 :					
Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2022	TARGET AKHIR 2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	85,70	87,62	87,60
Misi V Bupati Balangan Tahun 2021-2026 :					
Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif					
Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,6389	0,6693	0,6390

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Juai untuk Tahun 2024 terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan Pagu Indikatif sebesar Rp.4.318.397.991,00.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi Prioritas Kecamatan Juai di Tahun 2024 yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja



(Renja) yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan. Adapun program yang mendukung pencapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
  - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  - Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
2. Meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan
  - Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Untuk keterangan lebih jelas mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pendanaan kegiatan Kecamatan Juai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel Daftar Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Kecamatan Juai  
Tahun Anggaran 2024**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

		Perundang-Undangan	Undangan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			<b>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan

		Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			<b>Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor</b>
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>Persentase desa tertib administrasi umum</b>
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			<b>Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa</b>
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

		Permusyawaratan Desa	Permusyawaratan Desa
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Juai**

Rencana Kerja Kecamatan Juai Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahun 2024 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi program kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Bagi Kecamatan Juai, Renja Tahun 2024 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan dalam kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2024 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran. Rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Juai Tahun 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2024, Prioritas Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024 benar-benar yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas. Pelaksanaan kegiatan Renja Tahun 2024 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar bidang, satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun mengakomodir usulan masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Kecamatan Juai Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel T-C.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025**  
**Kabupaten Balangan**

SKPD : Kecamatan Juai

Kode Rek	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
'7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)</b>	Kab. Balangan	67,50	<b>3.514.256.000,00</b>	APBD		68,00	<b>3.865.681.600,00</b>
'7.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun</b>	Kab. Balangan	6 dokumen	<b>46.000.000,00</b>	APBD		6 dokumen	<b>50.600.000,00</b>
'7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Balangan	2 dokumen	<b>36.000.000,00</b>	APBD		2 dokumen	<b>39.600.000,00</b>
'7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Balangan	2 Dokumen	<b>5.000.000,00</b>	APBD		2 Dokumen	<b>5.500.000,00</b>

'7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Balangan	2 Dokumen	<b>5.000.000,00</b>	APBD		2 Dokumen	<b>5.500.000,00</b>
'7.01.01.2.02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku</b>	Kab. Balangan	12 Bulan	<b>2.807.956.000,00</b>	APBD		12 Bulan	<b>3.088.751.600,00</b>
'7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Kab. Balangan	22 orang per bulan	<b>2.755.000.000,00</b>	APBD		22 orang per bulan	<b>3.030.500.000,00</b>
'7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD</b>	Kab. Balangan	4 Dokumen	<b>52.956.000,00</b>	APBD		4 Dokumen	<b>58.251.600,00</b>
'7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	Kab. Balangan	12 Bulan	<b>57.000.000,00</b>	APBD		12 Bulan	<b>62.700.000,00</b>
'7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	Kab. Balangan	15 Orang	<b>57.000.000,00</b>	APBD		15 Orang	<b>62.700.000,00</b>
'7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Cakupan Penyediaan Administrasi Umum</b>	Kab. Balangan	12 Bulan	<b>123.100.000,00</b>	APBD		12 Bulan	<b>135.410.000,00</b>

		<b>Perangkat Daerah</b>							
'7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	Kab. Balangan	1 Paket	<b>6.500.000,00</b>	APBD		1 Paket	<b>7.150.000,00</b>
'7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	Kab. Balangan	1 Paket	<b>10.000.000,00</b>	APBD		1 Paket	<b>11.000.000,00</b>
'7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	Kab. Balangan	1 Paket	<b>39.600.000,00</b>	APBD		1 Paket	<b>43.560.000,00</b>
'7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>67.000.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>73.700.000,00</b>
'7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Balangan	12 Bulan	<b>236.280.000,00</b>	APBD		12 Bulan	<b>259.908.000,00</b>
'7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>58.080.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>63.888.000,00</b>
'7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	Kab. Balangan	12 Laporan	<b>151.800.000,00</b>	APBD		12 Laporan	<b>166.980.000,00</b>
'7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>26.400.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>29.040.000,00</b>



		<b>Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>							
'7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	Kab. Balangan	12 Bulan	<b>243.920.000,00</b>	APBD		12 Bulan	<b>268.312.000,00</b>
'7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</b>	Kab. Balangan	13 Unit	<b>104.000.000,00</b>	APBD		13 Unit	<b>114.400.000,00</b>
'7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</b>	Kab. Balangan	2 unit	<b>139.920.000,00</b>	APBD		2 unit	<b>153.912.000,00</b>
'7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<b>Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan</b>	Kab. Balangan	100%	<b>73.260.000,00</b>	APBD		100%	<b>80.586.000,00</b>
7.01.02.2.02	penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<b>Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	Kab. Balangan	100%	<b>73.260.000,00</b>	APBD		100%	<b>80.586.000,00</b>

7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>73.260.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>80.586.000,00</b>
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<b>Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat</b>	Kab. Balangan	100%	<b>97.240.000,00</b>	APBD		100%	<b>9.570.440</b>
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>63.890.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>9.570.440</b>
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<b>Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa</b>	Kab. Balangan	100 %	<b>26.400.000,00</b>	APBD		100 %	<b>106.964.000,00</b>
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa</b>	Kab. Balangan	100%	<b>8.450.000,00</b>	APBD		100%	<b>70.279.000,00</b>
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</b>	Kab. Balangan	4 Lembaga Kemasyaralaktan	<b>73.260.000,00</b>	APBD		4 Lembaga Kemasyaralaktan	<b>29.040.000,00</b>
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan	<b>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja</b>	Kab. Balangan	1 Dokumen	<b>97.240.000,00</b>	APBD		1 Dokumen	<b>9.295.000,00</b>

	oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	<b>dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</b>							
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>29.040.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>31.944.000,00</b>
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	<b>Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	Kab. Balangan	100%	<b>33.350.000,00</b>	APBD		100%	<b>36.685.000,00</b>
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</b>	Kab. Balangan	100%	<b>26.400.000,00</b>	APBD		100%	<b>29.040.000,00</b>
7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	<b>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan</b>	Kab. Balangan	50	<b>6.950.000,00</b>	APBD		50	<b>7.645.000,00</b>

	Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	<b>dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas</b>		Keluarga				Keluarga	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<b>Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor</b>	Kab. Balangan	100%	<b>80.520.000,00</b>	APBD		100%	<b>88.572.000,00</b>
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum</b>	Kab. Balangan	100%	<b>80.520.000,00</b>	APBD		100%	<b>88.572.000,00</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>40.920.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>45.012.000,00</b>
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</b>	Kab. Balangan	1 Laporan	<b>39.600.000,00</b>	APBD		1 Laporan	<b>43.560.000,00</b>

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase desa tertib administrasi umum ab. Balangan	Kab. Balangan	100%	<b>52.162.150,00</b>	APBD		100%	<b>57.378.365,00</b>
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kab. Balangan	100%	<b>52.162.150,00</b>	APBD		100%	<b>57.378.365,00</b>
7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kab. Balangan	1 Dokumen	<b>52.162.150,00</b>	APBD		1 Dokumen	<b>57.378.365,00</b>
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	Kab. Balangan	100%	<b>128.420.000,00</b>	APBD		100%	<b>141.262.000,00</b>
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kab. Balangan	100%	<b>128.420.000,00</b>	APBD		100%	<b>141.262.000,00</b>
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Balangan	1 Dokumen	<b>27.720.000,00</b>	APBD		1 Dokumen	<b>30.492.000,00</b>
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	Kab. Balangan	1	<b>34.320.000,00</b>	APBD		1	<b>37.752.000,00</b>

	pendayagunaan Aset Desa	Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Dokumen				Dokumen	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Balangan	1 Dokumen	<b>6.850.000,00</b>	APBD		1 Dokumen	<b>7.535.000,00</b>
	Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Balangan	1 Dokumen	<b>5.450.000,00</b>	APBD		1 Dokumen	<b>5.995.000,00</b>
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kab. Balangan	1 Dokumen	<b>13.200.000,00</b>	APBD		1 Dokumen	<b>14.520.000,00</b>
7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Balangan	1 Dokumen	<b>28.380.000,00</b>	APBD		1 Dokumen	<b>31.218.000,00</b>
TOTAL					<b>3.945.858.150,00</b>				<b>4.340.443.965,00</b>

## **4.2. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi**

Dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Juai tahun 2021- 2026 dijelaskan bahwa tujuan SKPD Kecamatan terbagi menjadi 2 (dua) tujuan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator pengukuran berupa nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan tujuan meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan dengan indikator penilaian skor IDM (rata-rata per desa). Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan pendanaan dan kegiatan tahun 2024 Kecamatan Juai wajib memperhatikan strategi pencapaian tujuan tersebut. Karena dengan tercapainya tujuan SKPD maka akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan sebagai tujuan akhir dari seluruh pencapaian SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

Jika dilakukan analisis atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Juai tahun 2024 dapat dirangkumkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik akan memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dikarenakan adanya pemenuhan atas kebutuhan sosial masyarakat berupa layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan.
2. Terdapat 4 (empat) program di penganggaran kegiatan Kecamatan Juai yang mendukung pencapaian tujuan meningkatnya kualitas pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan masyarakat.
3. Dalam penilaian skor IDM desa terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi bahan penilaian yaitu pemenuhan atas sarana prasarana kesejahteraan sosial, lingkungan dan ekonomi masyarakat di desa yang bersangkutan yang dapat diartikan bahwa dengan tercapainya tujuan meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan juai maka tingkat sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Juai juga meningkat.
4. Terdapat 2 (dua) program pendukung capaian tujuan meningkatnya kemandirian desa lingkup kecamatan yang berfungsi memfasilitasi dan mendampingi pemerintahan desa di Kecamatan Juai untuk meningkatkan skor IDM desa bersangkutan.

## **BAB.V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2024 adalah panduan dalam menjalankan tugas, pokok, fungsi Kecamatan Juai untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Dan merupakan manivestasi dari respon Kecamatan Juai Kabupaten Balangan terhadap kondisi lingkungannya baik eksternal maupun internal yang senantiasa berubah begitu cepat dan memerlukan pengamatan yang akurat serta diagnose lingkungan yang efektif. Rencana Kerja ini menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang sesuai dengan tugas, pokok, fungsi masing-masing, diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negative dalam operasional organisasi. Renja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Adanya Renja ini diharapkan agar Kecamatan Juai Kabupaten Balangan serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, terukur dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan , adil dan akuntabel.

Juai, Juni 2023



NANANG EDWARD, S.Sos., MM

NIP.19800127 200604 1 016





# PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

## KECAMATAN JUAI

Jalan Setia Karsa No. 03 Mungkur Uyam ( 71665 )

### KEPUTUSAN CAMAT JUAI NOMOR 050.11/34/CJ/ 2023

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUAI TAHUN 2024

#### CAMAT JUAI

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Juai tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 27 tahun 2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JUAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN JUAI TAHUN  
2024
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat  
Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan  
Juai Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Juai Tahun 2024  
mempunyai tugas Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan  
Juai Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

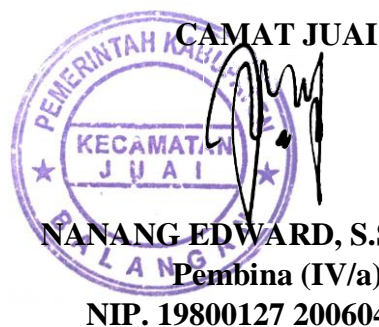
Ditetapkan di : JUAI  
Pada tanggal : Februari 2023



**CAMAT JUAI**  
**NANANG EDWARD, S.Sos., MM.**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19800127 200604 1 016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN JUAI TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	NANANG EDWARD, S.Sos., MM NIP. 19800127 200604 1 016	Camat	Pengarah
2	ERLIYANTI, SE NIP. 198510202010012031	Sekcam	Koordinator
3	HUJAIMAH, S.Kom NIP.19880212 201001 2 016	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4	YANTI MASITAH, S.Sos, M.AP NIP. 196703191987032009	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
5	DEWI BUDI ASTUTI, S.Pd NIP.19820305201001 2 017	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Anggota
6	MILI YUSMAWATI, S.Sos NIP. 198011172006042024	Kasi Pelayanan Publik	Anggota
7	H. NURYONO, S.Kep NIP. 197305071996021002	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Anggota
8	SAMSUL BAKHRI, S.Pd.I NIP. 19831125 200801 1 006	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban	Anggota
9	FERI ARIANTI, S.Pd.AUD NIP. 198402152007012002	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Anggota

  
**CAMAT JUAI**  
NANANG EDWARD, S.Sos., MM.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19800127 200604 1 016